BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa setingkat Provinsi di Indonesia, karena statusnya yang merupakan Provinsi Daerah Istimewa, daerah ini memiliki otonomi daerah yang berbeda dari daerah-daerah lainnya, otonomi khusus yang berlaku di daerah ini. Daerah Istimewa juga merupakan daerah tertua di Indonesia setelah Jawa Timur. Dahulunya, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dua negara yang berbeda yakni Negara Kasultanan dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Setelah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami kemerdekaan, dua negara tersebut diminta untuk bergabung menjadi satu wilayah bergabung bersama NKRI. Peleburan bekas (Negara) Kesultanan Yogyakarta dan (Negara) Kadipaten Paku Alaman akhirnya pun terjadi, dengan melewati berbagai prosedur dan hal tersebut sampai saat ini menjadi catatan sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari dan dikembangkan.Peleburan dua dimensi yang berbeda menjadi satu namun masing-masing diantaranya memiliki kualitas tinggi dan daya tarik tersendiri. Sampai saat ini pun, keistimewaan tersebut hanyalah satu diantara berbagai macam keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di tahun 1946, pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum benar-benar *rampung* (read; selesai) dikarenakan UUD yang mengatur susunan Daerah yang bersifat Istimewa sebagaimana pasal 18 UUD belum terbit, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya waktu tidak terbuang sia-sia, disamping menunggu UU yang dimaksud terbit, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka PA VIII dengan persetujuan BP DPR Daerah Istimewa Yogyakarta (Dewan Daerah) telah mengeluarkan maklmumat No. 18 tertanggal 18 Mei 1946, dimana redaksi maklumat tersebut berisi pembahasan tentang point-point yang mengatur kekuasaan legislasi dan eksekutif.

Secara keseluruhan, yang merancang maklumat Yogyakarta No . 18 Tahun 1946 tersebut dibuat oleh Badan Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah rancangan makmulat selesai dibuat dan disetujui oleh KNI Daerah Istimewa Yogyakarta, badan ini seketika membubarkan diri dan kemudian diganti oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk dengan merujuk kepada isi atau aturan-aturan yang telah dirancang dalam rancangan/rencana maklumat tersebut yang dibuat oleh Badan KNI DIY. Kemudian untuk pertama kalinya dalam sidang DPR Daerah Istimewa Yogyakarta mengesahkan rancangan/rencana darpada maklumat yang telah dibuat oleh Badan KNI daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Akhirnya, maklumat ini ditanda tangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Sri Paku Alaman VIII, dan juga ditanda tangani oleh Marlan selaku Ketua Badan Pekerja DPR Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Ketua DPR Daerah Istimewa Yogyakarta[1].

Secara tidak langusng, maklumat tersebut telah menyatakan bahwasannya (Negara) Kesultanan dan (Negara) Paku Alaman yang merupakan dua monarki, sudah resmi bersatu dalam sebuah Daerah Istimewa yang bernama Daerah

[1]Wikisource, http://id.wikisource.org. (Juma'at, 3 Oktober 2014, 16.46 Wib)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istimewa Yogyakarta. Pembktian bahwasannya dua Negara tersebut telah bersatu yakni dengan ditandai adanya aturan yang menyebutkan bahwasannya hanya ada sebuah Parlemen lokal untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta diresmikan sebagai Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasca, peleburan (Negara) Kesultanan Yogyakarta dan (Negara) Kadipaten Paku Alaman, daerah ini disebut sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menyebabkan sering terjadinya penyingkatan nomenkaltur menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah otonom bersifat khusus setingkat Provinsi, dikepalai oleh Sultan Hamengku Buwono X sebagai Kepala daerah DIY dan Sri Paku Alam IX sebagai Wakil Kepala Daerah DIY saat ini.

Seperti namanya yakni Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan istilah DIY, daerah ini memiliki berbagai aspek menarik di dalamnya, dari aspek sosial, budaya, hingga politik. Aspek-aspek tersebut juga menjadi bagian dari berbagai macam keistimewaan DIY. Dari berbagai macam aspek tersebut, masing-masing memberikan karakternya tersendiri dan istimewanya, karakter-karakter tersebut membawa Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal di tingkat nasional hingga ke dunia internasional. Menariknya adalah ketika mengulas sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta karena dari sini akan ditemukan hal paling mengesankan yakni peninggalan serangkaian candi yang dari dahulu hingga saat ini panoramanya membuat tempat ini banyak dan tak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

henti-hentinya dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal, domestik, hingga internasional.

Kerajaan Mataram Hindu yang di zaman dahulu pernah berjaya di bagian tengah pulau Jawa atau lebih tepatnya di wilayah selatan jawa Tengah, yang saat ini telah menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerajaan Mataram Hindu ini memiliki banyak jenis percandian dan komposisi dalam arsitektur candi pun bernuansa Hindu, namun ada juga sebagian komposisi arsitektur candi yang bernuansa Buddha. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat ada dua jenis candi yakni candi yang bercorak Hindu dan candi yang bercorak Buddha. Komposisi materil dalam bangunan candi yang terdapat di wilayah Yogyakarta sekarang ini sebagian terbuat dari batu andesit, dan hanya ada satu candi yang sekarang diketahui terbuat dari batu merah yakni candi Abang[2]. Dua candi yang paling terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah candi Borobudur dan candi Prambanan. Akhirnya pun, Daerah Istimewa ini banyak dilirik oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Ditambah dengan kemistisan yang sangat kental di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi daya tarik yang cukup potensial dalam mempromosikan Daerah Istimewa Yogyakarta di mata mancanegara, hingga akhirnya menjadi salah satu desstinasi kelas dunia.

Bangunan-bangunan candi tersebut kini telah dipandang sebagai ekspresi nyata yang bersifat abadi dari zaman klasik Jawa dan keistimewaannya benar-benar dapat dirasakan bagi setiap wisatawan. Serta kini telah banyak sejumlah

[2]Kepustakaan Candi, http://candi.pnri.go.id. (Juma'at, 03 Oktober 2014, 16.04 Wib)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar tulisan ilmiah mahasiswa dari berbagai macam Universitas yang menulis tentang peningalan-peninggalan tersebut[3].

Dari berbagai macam keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, aspek budaya ialah aspek yang tjuga idak boleh ditinggalkan dari komunikasi publik. Salah satunya yakni Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan *landmark* Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaannya di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menuliskan sejarah istimewa, dimulai ketika Sultan Hamengku Buwono (HB) I tahun 1963 naik takhta, langsung dirintis pembangunan Keraton, dari bentuk sederhana, hingga ahkirnya sampailah pada tatanan megah dan sempurna seperti saat ini, peran aktif Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat telah dapat dirasakan saat itu pula. Dalam kaitannya dengan Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Keraton Ngayoyogyakarta Hadiningrat memiliki peran aktif di dalamnya hingga saat ini, hal itu terlihat pada banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Istimewa yang juga menjadi *Abdidalem Keprajan* Keraton maupun Puro. Walau demikian mekanisme perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Istimewa tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisa dikatakan bahwasannya melihat pengulasan sejarah tersebut dari penyatuan dua Negara menjadi satu Daerah Istimewa dengan penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta, telah baanyak perkembangan yang mulai terlihat, seiring berjalannya waktu, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi Daerah Istimewa yang maju, tentunya tak terlepas dari keberadaan

---

3M.C. Ricklefs, *Yogyakarta Di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keraton yang juga mempunyai pengaruh dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengkaji perkembangan politik budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang kuat, hasilnya pun cukup dirasakan dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta karena sampai saat ini Keraton dan dengan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki hubungan yang sifatnya simbiosis mutualisme. Hubungan-hubungan yang masih terjaga baik di masing-masing sektor tersebut telah banyak menghasilkan hasil perubahan yang cukup berpengaruh dalam Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dampaknya pun, Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta seiring proses dan usaha mengabdinya bagi masyarakat Daerah istimewa Yogyakarta banyak mengalami reformasi birokasi. Reformasi birokarsi yang ada dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sedikit banyak telah mendapatkan campur tangan dari politik budaya Keraton yang sudah masuk di dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak maklumat Yogyakarta No. 18 Tahun 1946 diresmikan sehingga pada akhirnya (Negara) Kesultanan dan (Negara) Paku Alaman bersatu menjadi satu dalam satu Daerah Istimewa, yang disebut Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesungguhnya reformasi birokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dimulai sejak diresmikannya maklumat Yogyakarta No. 18 Tahun 1946. Kegiatan-kegiatan dalam upaya reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah istimewa Yogyakarta semakin terlihat dan kuat ketika otonomi daerah mulai diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kegiatan-kegiatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuknya sebagai upaya dalam reformasi birokrasi selalu menyertai proses penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Relasi birokrat dengan warga masyarakat umum terlihat ketika para birokrat di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta masih saja memperlihatkan nilai-nilai yang menjadi simbolisasi tradisional kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya dalam memperkuat nilai kekuatan hukum di mata masyarakat sehinggasimbol yang menjadi lambang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat selalu digunakan dan hadir di setiap momentum atau pagelaran-pagelaran setempat dandengan adanya kebijakan diwajibkannnya dipasang gambar Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX, serta di setiap transportasi umum dan di setiap lingkungan instansi Daerah Istimewa harus terpasang lukisan wayang sebagai upaya untuk menciptakan kesan keningratan dan kebangsawanan, mengingat budaya Keraton sangat kental sekali dan kemistisannya cukup bisa dirasakan, maka wajar jika ada keinginan untuk menciptakan kesan keningratan dan kebangsawanan di setiap sudut Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlebih jika dikaitkan dengan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana hal tersebut sampai saat ini belum selesai dalam pembahasannya, dan juga adanya birokrat yang dijadikan sebagai *abdi dalem* Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, secara khusus hal tersebut menjadi sah-sah saja karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah Keistimewaan, akan tetapi secara umum hal tersebut akan menimbulkan ketidaknetralan dalam birokrasi karena adanya birokrat sebagai *abdi dalem* akan semakin menjujung nilai-nilai kekuasaan kerajaan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini mengkaji dengan harapan tidak hanya mengetahui akan tetapi juga dapat menjelaskan serta mengambil pelajaran positif sehingga mampu menciptakan pemikiran baru terkait dengan reformasi birokrasi pemerintahan Daerah Istimewa Yogjakarta sebagai implikasi politik budaya Keraton, sehingga pemikiran baru tersebut dapat menjadi *problem solving* bagi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Keraton Yogyakarta kedepannya nanti. Alasan peneliti mengambil studi kasus ini karena *Pertama,* penulis sadar dengan apa yang telah disampaikan oleh dosen kebijakan publik bahwasannya untuk mengambil tema skripsi, janganlah mengikuti apa yang lagi menjadi pembicaraan atau mengikuti teman-temanmu, akan tetapi dalam mengambil tema skripsi sesuaikan dengan diri tentunya masih dalam wilayah yang sesuai dengan bidang studi yang sedang dijalani, supaya bisa bertanggungjawab dalam menyelesaikan tulisan akhir. Penulis memilih Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kedua,* penulis memiliki ketertarikan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kagum dengan Daerah Istimewa Yogyakarta karena adat istiadatnya sangatlah berperikemanusiaan, dari tingkat pemerintah hingga masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta lain dari pemerintahan daerah-daerah lainnya, dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dua unsur yakni unsur modern dan tradisional. Unsur tradisional tersebut mengikuti status daerahnya yakni sebagai daerah istimewa yang berasal dari kearifan lokal, sedangkan unsur modernnya mengikuti perkembangan zaman dan tetap taat pada demokrasi. Dalam mengakaji hal tersebut, dilakukan studi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Bappeda, dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (sebutan resmi Keraton Yogyakarta).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan, sesuai dengan judul Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Implikasi Budaya Politik Keraton, yakni sebagai berikut;

1. Bagaimana perkembangan budaya politik Keraton dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana *road map reformasi birokrasi* Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi implikasi budaya politik Keraton ?
3. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan 3 (tiga) pokok rumusan masalah tersebut dan sesuai dengan judul yakni Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Implikasi Budaya Politik Keraton, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mengkaji perkembangan budaya politik Keraton dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat diketahui dan dijelaskan sejauh mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh dan dampak yang dihasilkan atas masuknya budaya politik Keraton dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Mengkaji rencana kerja secara rinci yang menggambarkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi sebagai upaya dalam menghadapi implikasi budaya politik Keraton.
3. Mengkaji hal-hal yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat sehingga dapat terjawab tantangan yang dihadapi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam reformasi birokrasinya, sebagai implikasi budaya politik Keraton.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh pembaca dari berbagai kalangan terkait dengan implikasi politik budaya Keraton sehingga menyebabkan adanya reformasi birokrasi dalam Pemerintahan Daerah istimewa Yogyakarta. Skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan tambahan refrensi, lebih-lebih bisa memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan politik lokal dan antopologi politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kegunaan praktis, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi para akademisi ilmu politik, sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman di dalam praktek serta kajian tentang politik lokal dan antropologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang menjadi salah satu pembahasan dalam ilmu politik, mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk.

1.5 Penegasan Judul

Untuk mendapatkan kejelasan tentang judul penelitian skripsi ini sebagai upaya dalam menghindari sebuah kesalahpahaman, maka sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap judul penelitian dalam skripsi ini yaitu Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Implikasi Budaya Politik Keraton. Adapun hal-hal yang dirasa sangat diperlukan adanya penegasan yang terdapat dalam judul tersebut antara lain sebagai berikut:

Reformasi Birokrasi: Sesungguhnya, pada hakikatnya, reformasi birokrasi merupakan sebuah tindakan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan tata pemerintahan, yang utamanya dalam reformasi birokrasi tersebut menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta: Sebagai Daerah Istinewa, Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya mempunyai otonomi daerah khusus. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950[4] terbagi ke dalam lima Daerah Tingkat II yang terdiri atas satu daerah Kota Madya dan empat diantaranya merupakan Kabupaten Daerah Tingkat II, kelima daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kota Madya Yogyakarta yang terdiri

---

4Gudegnet Gudang Info Kota Jogja, https://gudeg.net. (Sabtu, 4 Oktober 2014, 06.22 Wib)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan. *Kedua,* Kabupaten Sleman yang merupakan Daerah Tingkat II yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa. *Ketiga,* Kabupaten Bantul yang merupakan Daerah Tingkat II yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa. *Keempat,* Kabupaten Kulonprogo yang merupakan Daerah Tingkat II yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 75 Desa. *Kelima,* Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan Daerah Tingkat II yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 144 Desa.

Budaya Politik: Pola perilaku suata masyarakat di sebuah kehidupan bernegara yang meliputi aspek-aspek seperti penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya[5].

Keraton : Keraton merupakan bangunan megah yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya seperti sebagai daerah tempat seorang penguasa raja atau ratu dalam memerintah, dan juga dijadikan sebagai tempat tinggalnya atau yang biasa disebut dengan istilah istana. Keraton juga sering dijadikan sebagai tempat pagelaran-pagelaran yang menyajikan mitos dan mitologi di dalam pertunjukannya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan penejlasan secara jelas, efektif, serta apa yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan benar, maka sebagaimana hal di bawah ini merupakan sistematika atau alur pembahasan skripsi ini, sebagai berikut;

5Wikipedia, http://id.wikipedia.org. (Sabtu, 4 Oktober 2014, 12.15 Wib).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab 1 berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kerangka konseptual meliputi reformasi birokasi yang dimana berisi sub-sub pembahasan pengertian dan teori birokrasi, konsep reformasi birokrasi, tujuan reformasi birokrasi, dan problematika dan reformasi birokrasi. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dimana berisi sub-sub pembahasan pengertian budaya, arti dan sejarah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Pengertian budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan politik dan alam sakral. Telaah pustaka.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang dibagi menjadi tiga yakni metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi, teknik analisis data yang dibagi menjadi empat yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan keabsahan data.

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan yang merupakan penyajian data dan pembahasan dari hasil penelitian sesuai dengan judulnya yakni "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Implikasi Budaya Politik Keraton".

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran, bab yang menyajikan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi, sehingga nantinya akan ditemukan point-point jawaban atas beberapa rumusan masalah yang sudah tersaji sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id